

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab Pertama berisi pendahuluan yang didalamnya memuat penjelasan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, landasan teoritik, tujuan penelitian, hipotesis, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Sebelum Uni Sovyet runtuh, dunia didominasi oleh dua kubu (bipolar) yaitu kubu AS dengan kapitalismenya dan Uni Sovyet dengan komunismenya. Saat itu masih terjadi *balance of power* (keseimbangan kekuasaan) diantara kedua kubu tersebut. Akibatnya setiap tindakan sebuah negara dari masing-masing kubu pasti dipengaruhi oleh dua kubu tersebut. Namun keruntuhan Uni Sovyet pada pertengahan tahun 1991 mengantarkan Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adikuasa dalam politik global.

Beberapa tahun kemudian kehidupan dunia aman sampai pada peristiwa runtuhnya gedung World Trade Center (WTC) di New York simbol kapitalisme Amerika Serikat (AS) dan kantor pusat pertahanan AS Pentagon di Washington D.C pada 11 September 2001 memberikan pengaruh pada situasi politik internasional. Hal ini kemudian menjadi urusan bersama dunia. Hampir seluruh kepala negara di dunia termasuk penguasa di negara-negara Islam mengikuti tuntutan AS. Perang melawan terorisme telah menjadi

kebijakan politik luar negeri AS yang dominan. Menyusul ledakan WTC itu, Presiden George W. Bush menyampaikan pidatonya melalui media sebagai berikut:

*“Kita akan memburu para pelakunya, termasuk negara-negara yang menampung, melindungi dan memberikan dukungan kepada mereka dan kita akan mengganjar mereka dengan hukuman setimpal”<sup>1</sup>*

Bersamaan dengan itu Bush mengumumkan bahwa pelaku terorisme adalah 19 orang Arab, dan menuduh Osama bin Laden bertanggung jawab atas serangan WTC 11 September 2001. Negara-negara Islam juga dituduh melindungi, menampung dan sarang teroris, diantaranya Afghanistan, Irak, Iran, Suria, Indonesia, Sudan, Aljazair, Bahrain, Maroko, Libya, Kuwait, Bangladesh, Mesir, Jordania, Lebanon, Pakistan, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Yaman.<sup>2</sup> Sosok Presiden Bush yang memiliki karakter neo-konservatif dapat dilihat pada gambar 1.1.

Dalam hitungan jam setelah peristiwa 11 September 2001, AS menyerang Afganistan yang diduga menjadi persembunyian organisasi teroris kelas dunia yaitu Al Qaeda. Akhirnya, pada tanggal 20 September 2001 di depan Kongres, Bush secara resmi mendeklarasikan perang melawan terorisme global yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Kongres sebagai lembaga legislatif mandiri mengesahkan kebijakan tersebut dengan pertimbangan untuk mencapai tujuan nasional AS yaitu mewujudkan perdamaian dan melindungi kepentingan nasionalnya di dunia internasional

Dua tahun setelah invasi ke Afghanistan itu, Bush kemudian menentukan musuh lain AS dalam perang melawan terorisme, yaitu Irak. Pada tanggal 19 Maret 2003, secara resmi Amerika Serikat melancarkan agresi militer ke Irak dengan tujuan melaksanakan perang global melawan terorisme.

Seperti disebutkan di atas bahwa sebagai negara adikuasa, kebijakan yang diambil AS menjadi urusan dunia dan mempengaruhi politik internasional tak terkecuali Indonesia. Indonesia melalui Hamzah Haz yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden menyatakan tidak ada terorisme di Indonesia.<sup>3</sup> Pernyataan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena tanggal 12 Oktober 2002 di Kuta, Bali terjadi ledakan yang dikenal dengan Bom Bali I.

Peristiwa itu bukan satu-satunya karena sebelum dan setelah bom Bali 2002 (Bom Bali I) terjadi juga serangkaian bom di Indonesia. Beberapa diantaranya yaitu bom di gereja pada bulan Desember 2000, bom di Mall Jakarta oleh warga negara Malaysia pada Agustus 2001, bom di hotel J.W. Marriot Jakarta pada Agustus 2003, bom Bali pada Oktober 2005 dan sebagainya.

Peristiwa Bom Bali di tahun 2005 (Bom Bali II) merupakan pemboman di Bali kedua terbesar setelah tahun 2002 yang tepatnya terjadi pada 1 Oktober 2005. Dari peristiwa itu terjadi tiga ledakan, satu di Kuta dan

dua di Jimbaran dengan sedikitnya 23 orang tewas dan 196 orang lainnya luka-luka. Kuta dan Jimbaran merupakan dua kabupaten yang letaknya saling berdekatan di pulau Bali bagian selatan seperti terlihat pada Gambar 1.2. Keduanya merupakan tempat tujuan wisata yang menarik dan banyak dikunjungi wisatawan.

Dengan terjadinya Bom Bali I dan II tersebut, Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia kembali menjadi sorotan dunia. Berbagai kecaman maupun simpati dari berbagai negara masuk ke Indonesia tidak terkecuali negara adidaya Amerika Serikat yang saat itu masih terluka atas tragedi WTC (11 September 2001) menyebabkan munculnya kebijakan-kebijakan Amerika terhadap Indonesia yang semakin ketat.

Fenomena di atas menjadi kajian menarik untuk dikaji dan dipahami lebih lanjut. Kebijakan Amerika Serikat sejauh ini telah banyak dikaji walaupun tidak banyak yang mengkaji secara khusus topik tersebut. Apalagi bila membahasnya dengan latar belakang (*setting*) teror bom yaitu bom Bali di Indonesia. Sehingga kajian ini dapat menjadi sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka penulis memilih judul penelitian sebagai berikut,

**“Kebijakan Pemerintah Bambang Yudhoyono Menanggulangi Tekanan Amerika Serikat Pasca Bom Bali II (2005)”**

## B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dan merupakan salah satu negara berkembang yang berperan aktif dalam politik internasional. Indonesia menjadi perhatian dunia sejak terjadinya serangkaian peristiwa peledakan bom di beberapa kota dari tahun 2000 hingga saat ini meski secara kuantitas masih banyak tetapi secara kualitas tidak sebesar bom Bali I (2002) dan bom Bali II (2005). Sebenarnya terorisme di Indonesia bukan merupakan hal baru baik yang berupa pembajakan maupun peledakan di tempat publik dari rumah sakit, gereja, masjid, pusat pertokoan sampai rumah-rumah para pejabat dan tempat-tempat vital lainnya. Sehingga kebijakan yang berkaitan dengan terorisme di Indonesia menjadi sorotan dunia terutama Amerika Serikat.

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, dalam *Mafāhīm Siyasī li Hizb at-Tahrīr* (Konsep-konsep Politik Hizbut Tahrir), menyebutkan bahwa inti politik luar negeri negara-negara kapitalis adalah penjajahan/imperialisme, yang akan selalu menyebarluaskan ideologinya dalam bentuk politik, ekonomi, budaya, militer dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Sebagai negara *Great Power*, AS mendominasi dunia melalui kebijakan-kebijakannya yang pasca Perang Dingin menjadi referensi utama dalam pembuatan kebijakan luar negeri negara lain di dunia termasuk Indonesia. Salah satunya yaitu kebijakan antiterornya yaitu *War Against of*

---

<sup>4</sup><http://farid1924.wordpress.com/2008/04/15/politik-luar-negeri-amerika-pasca->

*Terorism* (Perang Melawan Terorisme) tepatnya setelah terjadinya tragedi World Trade Center (WTC) pada tanggal 11 September 2001.

Terjadinya peledakan bom di beberapa wilayah di Indonesia menunjukkan kelemahan pada sistem keamanan negara. Mekanisme yang ada saat ini tidak sesuai dengan perkembangan global dalam sistem pertahanan serta keamanan negara. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat internasional khususnya maka pemerintah bisa lebih serius melakukan penelusuran berbagai peristiwa melalui pencegahan dini terhadap ancaman keamanan masyarakat dan pertahanan negara.

Aksi teror bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, mendorong pemerintah Indonesia menyatakan perang melawan terorisme. Dari peristiwa tersebut, hampir semua negara memberikan perhatian dan dukungan konkrit terhadap upaya Indonesia dalam pengungkapan kasus bom Bali terutama dalam proses investigasi untuk menangkap para pelaku teror dan mengajukan mereka ke pengadilan. Sehingga muncul kesadaran bahwa perang melawan terorisme memerlukan pendekatan lintas sektoral dan lintas negara.

Aksi-aksi kekerasan terorisme internasional di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia menjadi ancaman dan tantangan terbesar bagi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia di masa mendatang. Di tingkat bilateral Indonesia terus dituntut untuk meningkatkan kerja sama dengan berbagai negara seperti Australia, AS, Jepang, dan negara-negara tetangga Asia Tenggara lainnya

untuk meningkatkan kemampuan aparaturnegara dalam memerangi terorisme internasional.

Hal yang sama juga berlaku di tingkat regional, misalnya, ASEAN, karena Indonesia perlu mendorong berlanjutnya kerja sama kongkret antarnegara dalam pemberantasan terorisme internasional. Masalah terorisme tidak dapat dipisahkan dari isu radikalisme dan kemiskinan. Oleh karena itu, penanganan isu terorisme menyentuh isu-isu kesejahteraan, penciptaan kehidupan yang lebih baik, dan penyelenggaraan dialog antaragama yang konstruktif.

Setelah mengamati upaya Indonesia itu dalam memerangi terorisme, pemerintah AS menghargai pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas keberhasilannya dalam perang melawan terorisme yaitu dengan menangkap dan mengadili para pelaku yang bertanggung jawab atas terjadinya Bom Bali I dan II. Sosok Presiden Republik Indonesia yang ke-6 ini dapat dilihat pada gambar 1.3. Kedua negara sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral dalam bidang kerjasama *counter terrorism* dan pemulihan hubungan militer RI-AS.

### C. Perumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

**Bagaimana Kebijakan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Menanggulangi Tekanan Amerika Serikat Pasca Bom Bali II (2005)?**

### D. Landasan Teoritik

Untuk membahas dan menganalisa topik di atas digunakan teori sebagai berikut:

*Konsep Kepentingan Nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton :*

*“National Interest is the fundamental and ultimate determine that guides the decision maker of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conceptions of those elements that constitute the states’s most vital needs. The includes self preservations, independence, territorial integrity, military security and economic well being.”<sup>5</sup>*

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton bahwa Kepentingan Nasional adalah tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan, yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara. Unsur itu mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.”<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Jack C. Plano&Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, Third Edition, Western Michigan University (ABL-Clio, California 1980), hal 9.

<sup>6</sup> Jack C. Plano&Roy Olton. *Kamus Hubungan Internasional*, Jakarta, Putra A. Bardon, 1999.

Unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: kemampuan untuk mempertahankan diri, kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan termasuk mampu mengatur serta melindungi warga negaranya dalam wilayahnya dan memiliki pemerintahan berdaulat, keutuhan wilayah berarti suatu negara mempunyai hak untuk bekerjasama dengan negara lain berdasarkan kepentingannya, keamanan militer yaitu keamanan dalam negeri yang bebas dari pemberontakan dan keamanan luar negeri seperti serangan atau ancaman dari negara lain termasuk gerakan terorisme internasional dan unsur terakhir adalah kesejahteraan ekonomi merupakan kemampuan rakyat untuk memenuhi kebutuhannya dimana hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar mata uang dan pendapatan per kapita.

Terorisme merupakan isu global yang mengancam keamanan dalam negeri Indonesia khususnya dan dunia internasional pada umumnya sehingga pemerintah SBY merasa perlu mengambil tindakan untuk menindaklanjuti masalah ini sebagai langkah mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara lebih luas akibat adanya terorisme tersebut. Tentu saja hal itu dilandasi kepentingan nasional yang diartikan sebagai keinginan politik yang perlu dilindungi dan diperjuangkan.

Kepentingan nasional ini berupa kepentingan keamanan militer nasional dan kepentingan ekonomi Indonesia terutama di sektor pariwisata sebagai penyumbang devisa negara yang cukup besar bagi negara. Diawali dengan pernyataan presiden SBY untuk menghadapi aksi terorisme yang

semakin banyak maka dilakukan deteksi dini, pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.

Kebijakan antiteror pertama dilakukan oleh AS sejak peristiwa WTC (World Trade Center) pada tanggal 11 September 2001 yang lalu dan AS sebagai polisi dunia benar-benar mengawasi segala hal tentang terorisme yang terjadi di negara-negara lain. Maka segala kebijakan antiteror yang diambil Indonesia menjadi perhatian AS meski sebelumnya Indonesia menjadi bagian tidak penting dalam kebijakan luar negeri AS karena faktor structural yaitu kapabilitas power yang dimiliki Indonesia baik dari dimensi ekonomi, militer, dan politik amat tidak signifikan di tingkat internasional. Tetapi hal tersebut berubah sejak peristiwa bom Bali I (2002) dan bom Bali II (2005) berkaitan dengan sikap antiteror untuk menangani permasalahan keamanan internasional.

Dengan terjadinya serangkaian peledakan bom di Indonesia dari tahun 2000 sampai pasca bom Bali II (2005), AS mengeluarkan beberapa kebijakan terhadap Indonesia berkaitan dengan terorisme yang dianggap membahayakan bagi warganya yang berkunjung di Indonesia dan mengancam konstelasi politik internasional. Kebijakan tersebut merugikan Indonesia tetapi justru menjadikan Indonesia lebih fokus menanggulangi terorisme dengan berbagai keberhasilan nyata menangkap dan mengadili pelaku peledakan yang kemudian menjadi penilaian positif bagi AS terhadap Indonesia

Sehingga kepentingan nasional sebagai landasan kebijakan presiden SBY sebagai *decision maker* bisa terwujud yaitu terciptanya kestabilan kondisi keamanan dalam negeri yang didukung militer memadai untuk bisa melindungi warga negara Indonesia dan warga asing. Keamanan dalam negeri yang stabil berdampak pada kepercayaan masyarakat dunia untuk kembali mengunjungi dan berinvestasi di Indonesia terutama di Bali yang pasca bom Bali mengalami keterpurukan karena mata pencaharian utama masyarakat Bali ada di sektor pariwisata.

Maka dapat dijelaskan lagi bahwa pemerintah Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) dengan berpegang teguh pada Undang-undang Antiterorisme diantaranya membentuk pasukan khusus untuk memberantas terorisme dan menstabilkan keamanan dalam negeri yang nantinya akan berdampak positif terhadap kehidupan ekonomi, agama dan pariwisata. Tentu saja ini membutuhkan kerjasama dan dukungan dari negara lain seperti AS sebagai negara yang pertama kali menyatakan perang melawan terorisme sehingga kebijakan tersebut mempengaruhi kebijakan dunia.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah SBY menanggapi tekanan Amerika Serikat pasca Bom Bali II

- 2) Untuk mengidentifikasi kepentingan nasional Amerika Serikat terhadap Indonesia

#### **F. Hipotesis**

Kebijakan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono Menanggulangi Tekanan Amerika Serikat Pasca Bom Bali II (2005) melalui tindakan nyata memerangi terorisme dengan menggunakan pendekatan di bidang :

1. Militer, yaitu dengan penyergapan yang berupa tindakan atau operasi tertutup terhadap pelaku terorisme yang sudah diawasi oleh POLRI
2. Politik, yaitu penataan sistme politik dengan mengajukan revisi Undang-undang No.15/2003.
3. Budaya, yaitu strategi preventif dengan meluruskan cara pandang tentang jihad dan mati syahid yang dijadikan legitimasi para teroris melakukan aksinya termasuk mencari pengikut baru.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini membatasi jangkauannya pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat setelah bom Bali II tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 (masa pemerintahan Presiden George W.Bush di AS).

## **H. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif, yakni memaparkan hasil penggalian permasalahan berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan ilmiah berupa buku, artikel dan sumber-sumber lain termasuk internet.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan hasil penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri dari sub-bab yang saling berhubungan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan yang didalamnya memuat penjelasan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok masalah, landasan teoritik, tujuan penelitian, hipotesis, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab Kedua berisi Dampak Peristiwa Bom Bali II (2005) Di Indonesia yang di dalamnya memuat Bom Bali I (2002) di Indonesia, Terorisme dan Bom Bali II (2005) di Indonesia, Keadaan Indonesia Pasca Bom Bali II (2005), Keadaan Ekonomi Indonesia dan Kondisi Keamanan

Bab Ketiga berisi tentang Tekanan Amerika Serikat Terhadap Indonesia Pasca Bom Bali II (2005) yang di dalamnya memuat Kebijakan Umum Amerika Serikat Terhadap Terorisme dan Travel Warning Sebagai Bentuk Tekanan Amerika Serikat Terhadap Indonesia.

Bab Keempat menjelaskan tentang Berbagai Upaya Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono Menanggulangi Tekanan Amerika Serikat Terhadap Indonesia Pasca Bom Bali II (2005) yang didalamnya memuat Pengaruh Travel Warning dan Embargo Militer Militer Amerika Serikat Terhadap Indonesia dan Upaya Menanggulangi Travel Warning di Bidang Militer, Politik, Budaya.

Bab Kelima merupakan kesimpulan yang didalamnya terdapat rangkuman pembahasan dalam Bab I sampai dengan Bab IV, sebagai